ANALISIS KONDISI KEUANGAN KOTA PEKANBARU DENGAN METODE SISTEM PEMANTAUAN TREN KEUANGAN

Andre Wibowo Wirayudha T.
NPP. 33.0168
Program Studi Keuangan Publik
Email: andrewtrp623@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP., M.Si.
Email: elviramnalien@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Previous studies on local government financial conditions have primarily focused on measuring fiscal performance, financial independence, and fiscal capacity. However, limited attention has been given to the paradoxical condition in which a local government possesses high fiscal capacity while still exhibiting indications of unfavorable financial conditions. This gap highlights the need for a more comprehensive assessment of financial conditions through a financial trend-based approach.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the financial condition of the Pekanbaru City Government using the Financial Trend Monitoring System (FTMS).* ***Method:*** *This study employed a descriptive quantitative approach supported by descriptive qualitative analysis. Secondary data were obtained from the Local Government Financial Statements (LKPD) of Pekanbaru City for the period 2017-2024. Financial condition analysis was conducted using the Financial Trend Monitoring System (FTMS) through the measurement of fifteen indicators classified into three dimensions: revenue base, debt structure, and service-level flexibility. Qualitative data were collected through semi-structured interviews to support the interpretation of quantitative findings.* ***Result:*** *In the revenue base dimension, four of five indicators showed favorable trends, namely revenue-to-personnel expenditure ratio, financial independence ratio, intergovernmental revenue ratio, and local own-source revenue-to-expenditure ratio, while the operating revenue ratio showed an unfavorable trend. In the debt structure dimension, the cash and receivables ratio and current asset ratio demonstrated favorable trends, whereas the government cash ratio, short-term debt ratio, long-term debt ratio, revenue-to-debt ratio, and financial balance ratio showed unfavorable trends. In the service-level flexibility dimension, the revenue per capita ratio exhibited a favorable trend, while the financial flexibility ratio and infrastructure maintenance ratio showed unfavorable trends. Overall, seven of the fifteen indicators demonstrated favorable trends, while eight indicators exhibited unfavorable trends.* ***Conclusion:*** *The financial condition of the Pekanbaru City Government during 2017-2024 was generally less favorable, as most FTMS indicators showed unfavorable trends, particularly within the debt structure and service-level flexibility dimensions, despite the relatively favorable performance of the revenue base dimension.*

Keywords: *Financial Condition; Financial Trend Monitoring System; Fiscal Capacity; Local Government; Public Finance.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah umumnya berfokus pada pengukuran kinerja fiskal dan kapasitas keuangan daerah, namun belum banyak mengkaji fenomena daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi tetapi masih menunjukkan indikasi kondisi keuangan yang kurang baik. Pada Pemerintah Kota Pekanbaru terdapat kesenjangan antara tingginya kapasitas fiskal dengan dinamika kondisi keuangan yang tercermin dalam berbagai indikator keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung analisis kualitatif deskriptif. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2024. Analisis dilakukan menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) melalui pengukuran 15 indikator yang mencakup dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi terstruktur untuk mendukung interpretasi hasil penelitian. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi basis pendapatan, empat dari lima indikator menunjukkan tren baik, yaitu pendapatan per belanja pegawai, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja, sedangkan pendapatan operasional menunjukkan tren tidak baik. Pada dimensi struktur utang, rasio kas dan piutang serta rasio aset lancar menunjukkan tren baik, sedangkan rasio kas pemerintah, utang jangka pendek, utang jangka panjang, pendapatan per utang, dan keseimbangan keuangan menunjukkan tren tidak baik. Pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan, pendapatan per kapita menunjukkan tren baik, sedangkan fleksibilitas keuangan dan pemeliharaan infrastruktur menunjukkan tren tidak baik. Secara keseluruhan, tujuh dari lima belas indikator menunjukkan tren baik dan delapan indikator menunjukkan tren tidak baik. **Kesimpulan:** Kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru periode 2017-2024 berdasarkan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) kurang baik karena sebagian besar indikator menunjukkan tren tidak baik, terutama pada dimensi struktur utang dan fleksibilitas tingkat layanan, meskipun dimensi basis pendapatan menunjukkan kondisi yang relatif baik.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan; Keuangan Daerah; Kapasitas Fiskal; Pemerintah Daerah; Sistem Pemantauan Tren Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting dalam tata kelola sektor publik modern karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan publik, memenuhi kewajiban fiskal, menjaga kesinambungan pembangunan, serta mempertahankan stabilitas anggaran dalam jangka menengah dan panjang. Dalam konteks global, kajian mengenai keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menuntut kewenangan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, tetapi juga menuntut kapasitas keuangan yang memadai agar pemerintah lokal mampu menghadapi tekanan fiskal, perubahan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Studi mengenai keuangan pemerintah lokal menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal, kemandirian pendapatan, struktur belanja, beban kewajiban, dan kapasitas layanan menjadi aspek penting dalam menilai kesehatan fiskal pemerintah daerah (Caldas et al., 2022; Darmawati et al., 2024; Ritonga & Buanaputra, 2022). Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan baik diharapkan mampu mempertahankan keseimbangan antara pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Perhatian terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah semakin menguat setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan tekanan besar terhadap pendapatan publik dan belanja pemerintah. Krisis kesehatan global tersebut berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi, menurunnya penerimaan daerah, serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk pelayanan dasar. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, mengendalikan belanja, dan menjaga likuiditas menjadi indikator penting dalam menilai ketahanan fiskal daerah. Kajian internasional menempatkan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang menentukan kualitas pelayanan publik dan daya tahan institusi lokal terhadap ketidakpastian ekonomi (Bisogno et al., 2024; Cifuentes-Faura et al., 2024; Park et al., 2020). Oleh karena itu, analisis kondisi keuangan daerah tidak dapat hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi perlu memperhatikan tren indikator keuangan secara komprehensif.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya publik, memperkuat pelayanan masyarakat, dan mendorong kemandirian daerah. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi persoalan fiskal berupa ketergantungan terhadap dana transfer pusat, keterbatasan kapasitas Pendapatan Asli Daerah, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dengan kemampuan fiskal daerah. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dana transfer, dan karakteristik daerah berpengaruh terhadap kapasitas keuangan pemerintah daerah (Mubarok et al., 2022; Zamzami & Rakhman, 2023). Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pelimpahan kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan berkelanjutan.

Keuangan daerah pada dasarnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan keuangan pemerintah daerah menjadi relatif penting untuk menggambarkan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, aset, dan kewajiban pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan komprehensif, tetapi juga harus memperhatikan manfaat, keadilan, dan akuntabilitas publik (Sinurat, 2018). Sejalan dengan itu, kualitas laporan keuangan daerah menjadi dasar penting bagi evaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah, terutama dalam mengukur kemampuan daerah memenuhi kewajiban dan menjaga kesinambungan layanan publik (Sinurat et al., 2023; Wahyudi et al., 2024).

Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan, menjaga likuiditas, mendukung pelayanan publik, dan mempertahankan stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Analisis kondisi keuangan berbeda dari pengukuran kinerja keuangan biasa karena tidak hanya menilai capaian satu periode anggaran, tetapi juga melihat arah perkembangan indikator keuangan dari waktu ke waktu. Pengembangan tolok ukur kondisi keuangan daerah diperlukan agar pemerintah dapat memahami posisi fiskalnya secara lebih objektif dan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kesehatan fiskal daerah (Ritonga & Buanaputra, 2022). Kondisi keuangan juga dapat digunakan sebagai perspektif penting dalam menilai performa pemerintah daerah berdasarkan aspek pendapatan, belanja, operasional, dan struktur utang (Rahayu et al., 2023).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis kondisi keuangan daerah adalah Sistem Pemantauan Tren Keuangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kecenderungan kondisi keuangan daerah melalui serangkaian indikator yang mencerminkan basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan. Analisis berbasis tren penting karena kondisi keuangan daerah tidak selalu dapat dipahami melalui angka statis dalam satu tahun anggaran. Daerah dapat memiliki pendapatan yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan likuiditas, pertumbuhan kewajiban, atau rendahnya fleksibilitas belanja. Oleh karena itu, penggunaan indikator tren memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Penelitian terdahulu mengenai rasio keuangan daerah juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian,

pertumbuhan pendapatan, efisiensi, dan struktur belanja merupakan hal penting untuk mengukur kekuatan keuangan daerah (Runjung et al., 2022; Tumija & Sinta, 2022; Fahriza & Riswati, 2023).

Fenomena tersebut relevan untuk dikaji pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera bagian tengah. Dengan peran strategis tersebut, Kota Pekanbaru memiliki potensi fiskal yang relatif besar. Namun, besarnya potensi fiskal tidak selalu selaras dengan kondisi keuangan yang sehat. Berdasarkan data dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017–2024, terdapat dinamika pendapatan, belanja, PAD, dana transfer, kewajiban, dan rasio keuangan yang menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini menjadi penting karena pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi tetap dapat menghadapi tekanan keuangan apabila pengelolaan pendapatan, belanja, kas, aset lancar, dan kewajiban tidak berjalan seimbang.

Data awal menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan Kota Pekanbaru selama tahun 2017–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp697.466.656.719,96 dari total pendapatan sebesar Rp2.171.590.365.092,59 atau sebesar 32,11%. Rasio tersebut menurun menjadi 26,51% pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 26,42% pada tahun 2020. Setelah itu, rasio PAD terhadap total pendapatan meningkat secara bertahap menjadi 29,28% pada tahun 2021, 32,22% pada tahun 2022, 32,33% pada tahun 2023, dan 33,22% pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan pada akhir periode, kontribusi PAD masih belum mencapai separuh dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Pekanbaru masih perlu dianalisis secara lebih hati-hati karena struktur pendapatannya tetap memperlihatkan ketergantungan terhadap sumber pendapatan selain PAD.

Data kapasitas fiskal Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi yang secara formal tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Pada tahun 2020 rasio kapasitas fiskal Kota Pekanbaru sebesar 2,356 dengan kategori sangat tinggi, tahun 2021 sebesar 2,518 dengan kategori sangat tinggi, tahun 2022 sebesar 1,714 dengan kategori sedang, tahun 2023 sebesar 1,845 dengan kategori sangat tinggi, dan tahun 2024 sebesar 2,272 dengan kategori sangat tinggi. Secara ideal, kapasitas fiskal yang tinggi seharusnya mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pelayanan publik. Namun, kapasitas fiskal merupakan ukuran potensi kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak selalu menggambarkan kualitas pengelolaan kas, pengendalian belanja, dan kemampuan menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

Kondisi rill Kota Pekanbaru menunjukkan adanya fenomena kontradiktif. Di tengah kapasitas fiskal yang tinggi, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menghadapi persoalan utang belanja atau tunda bayar selama periode 2017–2024. Jumlah utang belanja tercatat sebesar Rp173.035.886.070,27 pada tahun 2017, turun menjadi Rp162.053.435.791,76 pada tahun 2018 dan Rp143.924.171.733,72 pada tahun 2019. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi Rp184.673.860.955,29 pada tahun 2020 dan Rp216.464.718.182,01 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 utang belanja turun menjadi Rp185.341.897.229,65 dan Rp163.468.432.364,63, tetapi meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp467.157.094.840,63. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang tinggi tidak secara otomatis menjamin kondisi likuiditas yang kuat atau struktur kewajiban yang aman.

Dinamika pendapatan dan belanja Kota Pekanbaru juga menunjukkan pola fluktuatif. Realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp2.171.590.365.092,59 pada tahun 2017 menjadi Rp2.780.228.449.089,48 pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan pendapatan tidak selalu stabil. Pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 2,92% pada tahun 2018, 6,00% pada tahun 2019, turun menjadi -1,27% pada tahun 2020, -0,06% pada tahun 2021, meningkat menjadi 6,06% pada tahun 2022 dan 11,05% pada tahun 2023, lalu melambat menjadi 0,98% pada tahun 2024. Pada sisi belanja, realisasi belanja juga bergerak fluktuatif, dari Rp2.152.172.723.977,60 pada tahun 2017 menjadi Rp2.761.174.961.015,75 pada tahun 2024. Fluktuasi pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kota Pekanbaru perlu dianalisis melalui pendekatan tren, bukan hanya berdasarkan besaran nominal dalam satu tahun tertentu.

Kondisi ideal dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terciptanya keseimbangan antara kapasitas pendapatan, kebutuhan belanja, kemampuan memenuhi kewajiban, dan keberlanjutan layanan publik. Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan baik seharusnya mampu meningkatkan PAD, mengendalikan ketergantungan fiskal, menjaga kecukupan kas dan aset lancar, membatasi pertumbuhan kewajiban, serta mempertahankan fleksibilitas belanja untuk mendukung pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, rasio keuangan menjadi alat penting untuk membaca kemampuan daerah secara objektif. Penelitian mengenai kemandirian dan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Agustina, 2022; Ginting et al., 2024; Lailiyah & Desitama, 2023).

Kondisi rill Kota Pekanbaru memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kondisi keuangan riil yang tercermin dalam indikator pendapatan, belanja, dan kewajiban. Pada satu sisi, Kota Pekanbaru memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan PAD yang cenderung meningkat pada akhir periode. Pada sisi lain, rasio kemandirian belum mencapai tingkat yang menunjukkan dominasi PAD dalam struktur pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan belanja masih fluktuatif, serta utang belanja meningkat tajam pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa analisis kondisi keuangan Kota Pekanbaru tidak cukup dilakukan melalui satu indikator penting, tetapi perlu menggunakan kerangka yang mampu membaca berbagai dimensi secara terpadu. Sistem Pemantauan Tren Keuangan menjadi relevan karena dapat menjelaskan kecenderungan kondisi keuangan daerah melalui indikator basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu umumnya membahas kinerja keuangan daerah, kemandirian fiskal, PAD, belanja daerah, atau kondisi keuangan pemerintah daerah secara umum. Namun, masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis fenomena daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tetapi menghadapi persoalan keuangan yang tercermin dalam utang belanja dan fluktuasi indikator keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan Kota Pekanbaru berdasarkan metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui indikator-indikator keuangan yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan fiskal daerah dalam periode 2017–2024.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kajian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah telah berkembang baik pada tingkat internasional maupun nasional. Penelitian internasional umumnya menitikberatkan pada pengukuran keberlanjutan fiskal, kapasitas keuangan, dan kesehatan keuangan pemerintah lokal melalui berbagai indikator keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang kuat cenderung berhubungan dengan kondisi keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Park et al., 2020; Caldas et al., 2022; Bisogno et al., 2024). Namun demikian, hasil penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada hubungan antara kapasitas fiskal, kinerja keuangan, dan keberlanjutan fiskal tanpa mengkaji kemungkinan terjadinya kontradiksi antara tingginya kapasitas fiskal dengan munculnya indikasi tekanan keuangan yang tercermin melalui indikator kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian internasional masih memberikan ruang untuk mengkaji bagaimana kondisi keuangan nyata pemerintah daerah dapat berbeda dari potensi fiskal yang dimilikinya.

Pada tingkat nasional, penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi menunjukkan adanya variasi kondisi keuangan antar daerah yang dipengaruhi oleh karakteristik pendapatan dan belanja masing-masing pemerintah daerah (Rahayu et al., 2023). Penelitian lain menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal, pertumbuhan keuangan, dan struktur pendapatan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah (Runjung et al., 2022; Tumija & Sinta, 2022). Sementara itu, penelitian mengenai pengembangan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia menekankan pentingnya penggunaan indikator tren keuangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi fiskal pemerintah

daerah (Ritonga & Buanaputra, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengukuran kondisi keuangan atau kinerja keuangan daerah secara umum, sehingga belum secara khusus menjelaskan fenomena daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi tetapi menunjukkan indikasi kondisi keuangan yang kurang baik berdasarkan tren indikator keuangannya.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) pada periode 2017–2024 untuk menjelaskan kondisi keuangan daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi namun menunjukkan dinamika keuangan yang fluktuatif. Penelitian ini menempati posisi untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis tren kondisi keuangan berdasarkan dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi teoritis karena perkembangan desentralisasi fiskal menuntut tersedianya indikator yang mampu menggambarkan kesehatan fiskal daerah secara lebih komprehensif. Indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada indikator-indikator parsial seperti kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, atau efisiensi belanja. Padahal, kondisi keuangan daerah merupakan konsep yang lebih luas karena mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kapasitas pendapatan, mengelola kewajiban, menjaga likuiditas, serta menjamin keberlanjutan pelayanan publik dalam jangka panjang (Ritonga & Buanaputra, 2022). Kajian internasional juga menunjukkan bahwa analisis kondisi keuangan menjadi hal penting dalam menilai keberlanjutan fiskal pemerintah lokal dan mendeteksi potensi tekanan keuangan secara lebih dini dibandingkan pengukuran keuangan konvensional (Bisogno et al., 2024; Cifuentes-Faura et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkaya pengembangan kajian kondisi keuangan pemerintah daerah melalui penggunaan Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) sebagai pendekatan yang menilai tren indikator keuangan secara berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan. Informasi mengenai kondisi keuangan daerah menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah untuk memahami posisi fiskalnya secara objektif dan menyeluruh. Pengukuran kondisi keuangan yang berbasis tren memungkinkan identifikasi perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan analisis satu periode anggaran (Rahayu et al., 2023). Selain itu, penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif terhadap pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah (Wahyudi et al., 2024; Runjung et al., 2022).

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan pendanaan dan kebutuhan pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Analisis kondisi keuangan yang komprehensif dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kesehatan fiskal daerah secara objektif sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan publik (Caldas et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem evaluasi kondisi keuangan daerah juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan utama reformasi pengelolaan keuangan sektor publik (Sinurat et al., 2023).

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Kajian mengenai kapasitas keuangan pemerintah lokal menunjukkan bahwa kemampuan fiskal memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas organisasi dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Park et al., 2020). Pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah juga semakin berkembang melalui pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan berbagai indikator keuangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesehatan fiskal daerah (Caldas et al., 2022). Pengembangan indikator pengukuran kondisi keuangan pemerintah kota menunjukkan bahwa analisis kondisi keuangan perlu dilakukan melalui berbagai indikator yang mampu merepresentasikan kemampuan pendapatan, struktur kewajiban, dan kapasitas pelayanan publik secara berkelanjutan (Ritonga & Buanaputra, 2022). Selain itu, karakteristik fiskal daerah terbukti memengaruhi performa keuangan pemerintah daerah sehingga kondisi keuangan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu indikator keuangan tertentu (Zamzami & Rakhman, 2023). Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan pemerintah lokal merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Bisogno et al., 2024).

Pada tingkat nasional, penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik keuangan yang berbeda berdasarkan struktur pendapatan, belanja, dan kewajiban yang dimiliki (Rahayu et al., 2023). Analisis rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih menjadi karakteristik yang umum ditemukan pada pemerintah daerah di Indonesia (Tumija & Sinta, 2022). Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah juga terbukti berperan penting dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah (Runjung et al., 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah turut dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal dan struktur belanja yang dimiliki daerah (Tumija, 2023). Selain itu, struktur pendapatan daerah masih menjadi komponen utama dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Sinurat et al., 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada kinerja keuangan, kemandirian fiskal, keberlanjutan fiskal, maupun faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu juga cenderung menggunakan indikator keuangan secara parsial atau menilai kondisi keuangan daerah secara umum. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) melalui analisis lima belas indikator yang mencakup dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan selama periode 2017–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan tren indikator keuangan daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian yang digunakan. Berbagai penelitian terdahulu mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah umumnya dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kelompok pemerintah daerah tertentu dengan tujuan membandingkan kondisi keuangan antarwilayah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru masih sangat terbatas, terutama yang menggunakan data terbaru setelah periode pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui pengkajian kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah

dengan kapasitas fiskal yang tergolong tinggi di Indonesia, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih penting mengenai kondisi keuangan daerah pada periode 2017–2024.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada metode dan pendekatan analisis yang digunakan. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, atau rasio keuangan tertentu, penelitian ini menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) untuk menganalisis kondisi keuangan daerah secara komprehensif. Metode tersebut memungkinkan analisis dilakukan melalui lima belas indikator yang mencakup dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan sehingga tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan pada satu periode tertentu, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan kondisi keuangan daerah dari waktu ke waktu. Dari aspek teoretis, penelitian ini mengintegrasikan konsep desentralisasi fiskal, keuangan daerah, dan kondisi keuangan pemerintah daerah ke dalam kerangka analisis tren keuangan yang berorientasi pada kesehatan fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kebaruan temuan dalam penelitian ini terletak pada identifikasi kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menunjukkan adanya perbedaan antara kapasitas fiskal daerah yang tergolong tinggi dengan hasil pengukuran kondisi keuangan berdasarkan indikator SPTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator kondisi keuangan bergerak searah dengan tingginya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Temuan ini memberikan perspektif baru bahwa kapasitas fiskal yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sepenuhnya baik apabila ditinjau melalui dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian kondisi keuangan pemerintah daerah melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap tren indikator keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) berdasarkan dimensi basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan selama periode 2017–2024 guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode utama untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pengukuran indikator-indikator keuangan yang terdapat dalam Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan daerah berdasarkan data keuangan yang terukur. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah.

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan fokus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kota Pekanbaru yang memiliki kapasitas fiskal relatif tinggi namun menunjukkan dinamika kondisi keuangan yang menarik untuk dianalisis melalui pendekatan Sistem Pemantauan Tren Keuangan. Selain itu, BPKAD merupakan instansi yang memiliki kewenangan

dalam pengelolaan data keuangan daerah sehingga menjadi sumber informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru periode 2017–2024, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa laporan keuangan yang menjadi dasar dalam perhitungan indikator Sistem Pemantauan Tren Keuangan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan keuangan lainnya yang terdapat dalam LKPD Kota Pekanbaru. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara lebih mendalam sekaligus tetap mempertahankan fokus pembahasan sesuai tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah analisis kuantitatif menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) yang dikembangkan oleh Kusnadhi dan Ritonga. Analisis dilakukan dengan menghitung lima belas indikator keuangan yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan. Nilai masing-masing indikator dihitung berdasarkan data keuangan daerah selama periode 2017–2024, kemudian dianalisis kecenderungan trennya untuk menentukan kondisi baik atau tidak baik. Tahap kedua adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mendukung interpretasi hasil pengukuran indikator keuangan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penggunaan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit menjadi salah satu upaya untuk menjamin tingkat keandalan dan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang memadai sehingga mampu mendukung hasil analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Dimensi Basis Pendapatan

Dimensi basis pendapatan dianalisis untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang menjadi dasar pembiayaan kegiatan pemerintahan. Indikator ini terdiri atas lima indikator, yaitu pendapatan per belanja pegawai, pendapatan operasional, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja.

Tabel 1.
Hasil Analisis Dimensi Basis Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024

No	Indikator	Hasil Tren
1	Pendapatan per Belanja Pegawai	Baik
2	Pendapatan Operasional	Tidak Baik
3	Rasio Kemandirian	Baik
4	Rasio Antar Pemerintah	Baik
5	Rasio PAD per Belanja	Baik

Sumber: Hasil Analisis SPTK Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1 Hasil Analisis Dimensi Basis Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024, terdapat lima indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan daerah pada dimensi basis pendapatan, yaitu pendapatan per belanja pegawai, pendapatan operasional, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa empat indikator memiliki tren yang baik, yaitu pendapatan per belanja pegawai, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja. Sementara itu, hanya satu indikator yang menunjukkan tren tidak baik, yaitu pendapatan operasional.

Indikator pendapatan per belanja pegawai yang menunjukkan tren baik mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghasilkan pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban belanja pegawai yang harus ditanggung. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendapatan daerah masih mampu mendukung pembiayaan kebutuhan aparatur pemerintahan secara memadai. Selanjutnya, rasio kemandirian yang menunjukkan tren baik menggambarkan adanya kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dapat ditekan.

Pada indikator rasio antar pemerintah, hasil tren yang baik menunjukkan bahwa hubungan fiskal antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat lainnya masih berada pada kondisi yang mendukung keberlangsungan keuangan daerah. Selain itu, rasio PAD per belanja yang menunjukkan tren baik mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan belanja daerah mengalami perkembangan yang positif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, indikator pendapatan operasional menunjukkan tren tidak baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan operasional belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan operasional pemerintah daerah selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum basis pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada kategori yang baik, masih terdapat aspek pendapatan operasional yang perlu mendapat perhatian agar kemampuan keuangan daerah menjadi semakin kuat dan berkelanjutan.

Gambar 1.
Tren Rasio Pendapatan Operasional Kota Pekanbaru

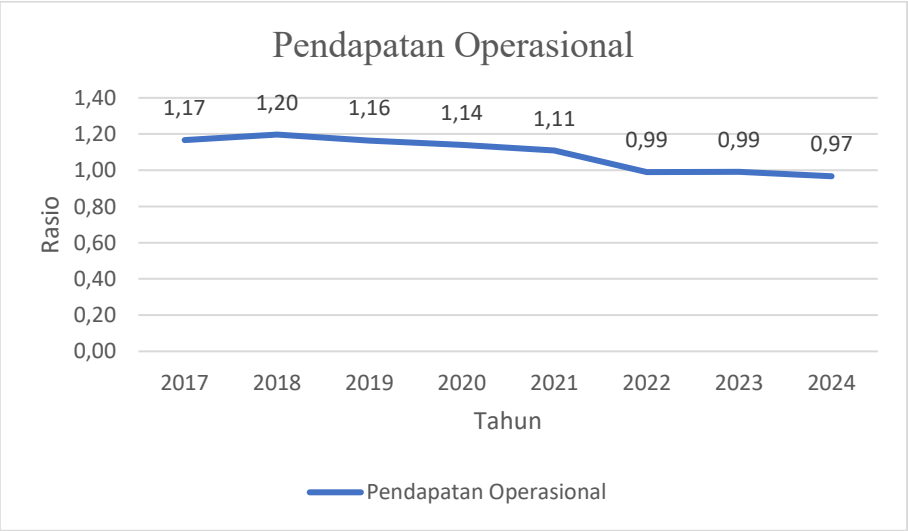

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan metode SPTK (2026)

Berdasarkan grafik rasio pendapatan operasional Kota Pekanbaru tahun 2017–2024 terlihat bahwa rasio tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tidak mampu mengimbangi peningkatan belanja operasional pemerintah daerah. Menurut Kusnadhi dan Ritonga (2017), tren rasio pendapatan operasional yang menurun mengindikasikan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan operasionalnya dari sumber pendapatan yang tersedia. Dengan demikian, indikator rasio pendapatan operasional pada Pemerintah Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori tren yang kurang baik karena menunjukkan penurunan kemampuan fiskal dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan lima indikator yang dianalisis, dimensi basis pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024 secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, karena sebagian besar indikator menunjukkan tren yang positif. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas pendapatan yang relatif memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun masih terdapat indikator tertentu yang menunjukkan perlunya peningkatan kinerja pada aspek pendapatan operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep kondisi keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kesehatan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh kemampuan pendapatan tersebut dalam mendukung kebutuhan operasional, belanja daerah, dan keberlanjutan fiskal secara keseluruhan (Ritonga & Buanaputra, 2022). Temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu diikuti oleh perbaikan seluruh indikator kondisi keuangan apabila pertumbuhan kebutuhan belanja dan operasional daerah berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kapasitas pendapatan daerah (Rahayu et al., 2023).

3.2 Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Dimensi Struktur Utang

Dimensi struktur utang menilai kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi kewajiban keuangannya, menjaga likuiditas, serta mempertahankan keseimbangan antara aset, pendapatan, dan kewajiban. Dimensi ini terdiri atas tujuh indikator, yaitu rasio kas pemerintah, rasio

kas dan piutang, raiso aset lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang, pendapatan per utang, dan keseimbangan keuangan.

Tabel 2.
Hasil Analisis Dimensi Struktur Utang Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024

No	Indikator	Hasil Tren
1	Rasio Kas Pemerintah	Tidak Baik
2	Rasio Kas dan Piutang	Baik
3	Rasio Aset Lancar	Baik
4	Utang Jangka Pendek	Tidak Baik
5	Utang Jangka Panjang	Tidak Baik
6	Pendapatan per Utang	Tidak Baik
7	Keseimbangan Keuangan	Tidak Baik

Sumber: Hasil Analisis SPTK Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024, diolah peneliti (2026).

Dimensi struktur utang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan kondisi aset, kas, dan sumber pendapatan yang dimiliki. Analisis dimensi ini penting karena dapat menggambarkan tingkat solvabilitas dan likuiditas pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan serta membiayai pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK), dimensi struktur utang dianalisis melalui tujuh indikator, yaitu rasio kas pemerintah, rasio kas dan piutang, rasio aset lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang, pendapatan per utang, dan keseimbangan keuangan.

Berdasarkan Tabel 2. Hasil Analisis Dimensi Struktur Utang Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024, terdapat dua indikator yang menunjukkan tren baik, yaitu rasio kas dan piutang serta rasio aset lancar. Sementara itu, lima indikator lainnya menunjukkan tren tidak baik, yaitu rasio kas pemerintah, utang jangka pendek, utang jangka panjang, pendapatan per utang, dan keseimbangan keuangan.

Indikator rasio kas dan piutang yang menunjukkan tren baik mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan kas dan piutang sebagai sumber daya keuangan untuk mendukung operasional pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki masih mampu memberikan dukungan terhadap kebutuhan pembiayaan jangka pendek pemerintah daerah. Demikian pula dengan rasio aset lancar yang menunjukkan tren baik, yang berarti bahwa jumlah aset lancar yang dimiliki pemerintah daerah relatif memadai dalam mendukung kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek.

Namun demikian, sebagian besar indikator dalam dimensi struktur utang menunjukkan tren tidak baik. Rasio kas pemerintah yang berada pada kategori tidak baik mengindikasikan bahwa kemampuan kas yang tersedia belum menunjukkan perkembangan yang optimal selama periode penelitian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendesak. Selanjutnya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang menunjukkan tren tidak baik menggambarkan bahwa struktur kewajiban keuangan daerah belum mengalami perbaikan yang signifikan dalam kurun waktu 2017–2024.

Selain itu, pendapatan per utang yang menunjukkan tren tidak baik mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum sepenuhnya mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam kaitannya dengan kewajiban yang dimiliki. Sementara itu, keseimbangan keuangan yang juga menunjukkan tren tidak baik menggambarkan bahwa keseimbangan antara sumber daya keuangan

dan kewajiban keuangan daerah masih memerlukan perhatian lebih agar kondisi keuangan daerah menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2.
Tren Rasio Kas Pemerintah Kota Pekanbaru



Sumber: *Diolah oleh peneliti menggunakan metode SPTK (2026)*

Berdasarkan grafik indikator rasio kas Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017–2024 terlihat bahwa rasio kas menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan rasio kas mengindikasikan bahwa pertumbuhan kas dan setara kas tidak mampu mengimbangi peningkatan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dalam konsep Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK), rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki. Semakin tinggi rasio kas menunjukkan semakin baik tingkat likuiditas pemerintah daerah. Sebaliknya, tren rasio kas yang menurun menunjukkan melemahnya kemampuan likuiditas dan meningkatnya risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu, indikator rasio kas Pemerintah Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori tren yang tidak baik karena menunjukkan penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kecukupan kas terhadap kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi struktur utang Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024 cenderung berada pada kategori tidak baik, karena mayoritas indikator yang dianalisis menunjukkan tren negatif. Dari tujuh indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang menunjukkan tren baik, sedangkan lima indikator lainnya menunjukkan tren tidak baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam aspek aset lancar serta pengelolaan kas dan piutang, kondisi struktur utang secara keseluruhan masih memerlukan perhatian dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah. Oleh karena itu, dimensi struktur utang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2017–2024 melalui pendekatan Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara aset, kas, dan kewajiban yang dimiliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa kesehatan fiskal daerah harus diukur secara komprehensif melalui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi

kewajiban serta mempertahankan stabilitas keuangan secara berkelanjutan (Rahayu et al., 2023; Ritonga & Buanaputra, 2022).

3.3 Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Dimensi Fleksibilitas Tingkat Layanan

Dimensi fleksibilitas tingkat layanan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kapasitas pelayanan publik di tengah perubahan kondisi fiskal. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator, yaitu pendapatan per kapita, fleksibilitas keuangan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Tabel 3.
Hasil Analisis Dimensi Fleksibilitas Tingkat Layanan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024

No	Indikator	Hasil Tren
1	Pendapatan per Kapita	Baik
2	Fleksibilitas Keuangan	Tidak Baik
3	Pemeliharaan Infrastruktur	Tidak Baik

Sumber: Hasil Analisis SPTK Kota Pekanbaru Tahun 2017–2024, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 3., dimensi fleksibilitas tingkat layanan menunjukkan bahwa satu indikator berada pada kategori baik, yaitu pendapatan per kapita, sedangkan dua indikator lainnya, yaitu fleksibilitas keuangan dan pemeliharaan infrastruktur berada pada kategori tidak baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kemampuan yang relatif baik dalam menghasilkan pendapatan bagi setiap penduduk, kemampuan untuk mempertahankan fleksibilitas fiskal dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dimensi fleksibilitas tingkat layanan digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik melalui dukungan kapasitas keuangan yang memadai.

Indikator pendapatan per kapita menunjukkan tren yang baik selama periode 2017–2024. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tersedia untuk setiap penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya keuangan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kota Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan selama periode penelitian seiring dengan meningkatnya total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kapasitas yang relatif baik dalam menghasilkan pendapatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator fleksibilitas keuangan menunjukkan tren yang tidak baik selama periode penelitian. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dipenuhi. Tren yang tidak baik menunjukkan bahwa ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru cenderung mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan daerah telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersifat wajib sehingga fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lainnya menjadi semakin terbatas. Semakin rendah

tingkat fleksibilitas keuangan maka semakin kecil kemampuan pemerintah daerah untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat maupun dinamika lingkungan fiskal yang terjadi.

Indikator pemeliharaan infrastruktur juga menunjukkan tren yang tidak baik. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur publik melalui alokasi belanja yang memadai. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena menjadi sarana pendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pemeliharaan infrastruktur belum menunjukkan perkembangan yang optimal selama periode penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan kebutuhan belanja daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal yang dapat mendukung keberlanjutan infrastruktur publik secara memadai.

Fleksibilitas tingkat layanan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam perspektif teori kondisi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan baik seharusnya mampu menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa mengalami tekanan yang berlebihan terhadap kapasitas keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan tersebut belum sepenuhnya tercapai pada Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2017–2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa keterbatasan fleksibilitas fiskal dapat menjadi indikasi menurunnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat layanan publik secara optimal (Rahayu et al., 2023). Dengan demikian, hasil analisis pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan memperkuat temuan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru secara keseluruhan berada dalam kategori kurang baik berdasarkan hasil pengukuran Sistem Pemantauan Tren Keuangan.

Gambar 3.
Tren Rasio Fleksibilitas Keuangan Kota Pekanbaru

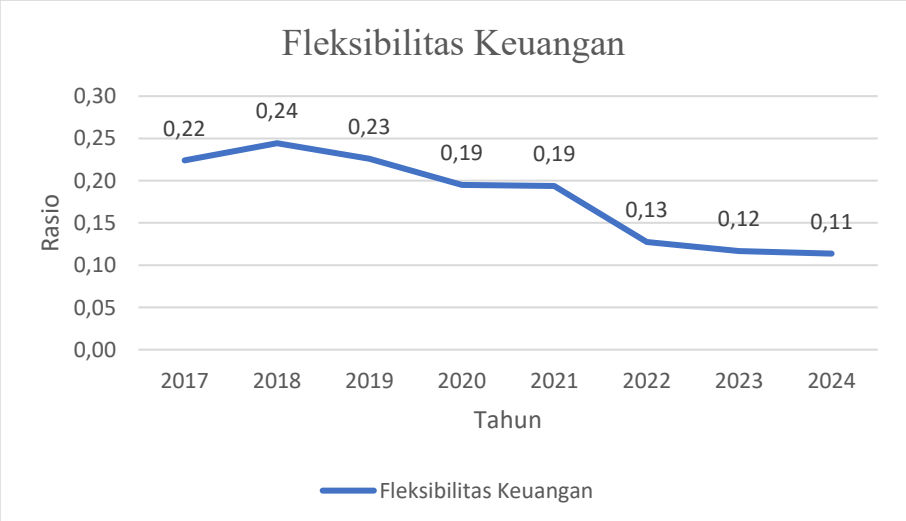

Sumber: *Diolah oleh peneliti menggunakan metode SPTK (2026)*

Berdasarkan grafik fleksibilitas keuangan Kota Pekanbaru tahun 2017–2024 terlihat bahwa rasio tersebut cenderung mengalami penurunan. Rasio fleksibilitas keuangan menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang fiskal setelah memenuhi kebutuhan belanja operasional yang bersifat wajib. Semakin tinggi rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan bagi program pembangunan, pelayanan publik, maupun kebutuhan strategis lainnya. Sebaliknya, tren yang menurun mengindikasikan bahwa proporsi pendapatan yang dapat digunakan secara fleksibel semakin berkurang karena meningkatnya beban belanja operasional. Berdasarkan konsep Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK), kondisi tersebut menunjukkan penurunan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, indikator rasio fleksibilitas keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dikategorikan memiliki tren yang tidak baik karena menunjukkan semakin terbatasnya ruang fiskal yang tersedia selama periode penelitian.

Pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pendapatan per kapita, fleksibilitas keuangan, dan pemeliharaan infrastruktur masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Priyono, 2021) yang menemukan bahwa beberapa indikator kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan tren yang tidak diharapkan sehingga diperlukan pemantauan kondisi keuangan secara berkelanjutan sebagai sistem peringatan dini. Penelitian (Laksmiwati, 2023) juga menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Badung, indikator pendapatan per kapita mengalami tren yang tidak baik meskipun indikator fleksibilitas keuangan dan pemeliharaan infrastruktur menunjukkan tren yang baik. Selain itu, penelitian (Rachmadina, 2025) menemukan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan dipengaruhi oleh rendahnya kemandirian fiskal dan berbagai keterbatasan keuangan yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian Kota Pekanbaru memperkuat pandangan bahwa fleksibilitas tingkat layanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk menjaga kesinambungan layanan dan infrastruktur publik (Priyono, 2021; Laksmiwati, 2023; Rachmadina, 2025).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total lima belas indikator yang dianalisis dalam Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK), tujuh indikator menunjukkan tren baik, sedangkan delapan indikator lainnya menunjukkan tren tidak baik. Pada dimensi basis pendapatan, empat dari lima indikator menunjukkan tren baik, yaitu rasio pendapatan per belanja pegawai, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja, sedangkan rasio pendapatan operasional menunjukkan tren tidak baik. Pada dimensi struktur utang, dua indikator menunjukkan tren baik, yaitu rasio kas dan piutang serta rasio aset lancar, sedangkan lima indikator lainnya, yaitu rasio kas pemerintah, rasio utang jangka pendek, rasio utang jangka panjang, rasio pendapatan per utang, dan rasio keseimbangan keuangan menunjukkan tren tidak baik. Sementara itu, pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan, indikator pendapatan per kapita menunjukkan tren baik, sedangkan indikator fleksibilitas keuangan dan pemeliharaan infrastruktur menunjukkan tren tidak baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru secara keseluruhan masih kurang baik karena sebagian besar indikator menunjukkan tren yang tidak baik, terutama pada dimensi struktur utang dan fleksibilitas tingkat layanan, meskipun dimensi basis pendapatan menunjukkan kondisi yang relatif baik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator kondisi keuangan mengalami tren yang diharapkan, sehingga diperlukan pemantauan kondisi keuangan secara berkala sebagai sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan daerah (Priyono et al., 2021). Selanjutnya, penelitian pada Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar indikator mengalami tren yang baik, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tren tidak baik, terutama pada aspek kemandirian keuangan dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Laksmiwati & Yudianto, 2023). Sementara itu, penelitian pada pemerintah daerah wilayah Sumatera Bagian Selatan menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pada dimensi struktur utang dan rendahnya kemandirian fiskal akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi (Rachmadina & Robinson, 2025). Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa kondisi keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, kewajiban, dan menjaga keberlanjutan fiskal secara berkelanjutan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep kondisi keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kesehatan fiskal suatu daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan, mengelola kewajiban, dan menjaga fleksibilitas fiskal untuk mendukung pelayanan publik secara berkelanjutan (Ritonga & Buanaputra, 2022). Tren baik pada rasio kemandirian, rasio utang jangka panjang, rasio keseimbangan keuangan, dan rasio pendapatan per kapita menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat, sesuai dengan teori kapasitas fiskal dan kesehatan keuangan yang menekankan pentingnya kemandirian pendapatan dan manajemen kewajiban jangka panjang. Sementara itu, tren negatif pada indikator lainnya menegaskan bahwa kapasitas fiskal tinggi tidak selalu sejalan dengan kemampuan fleksibilitas belanja dan likuiditas jangka pendek.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi dan perbedaan. Penelitian nasional dan internasional sebelumnya menekankan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemandirian fiskal dan struktur pendapatan (Rahayu et al., 2023; Bisogno et al., 2024; Caldas et al., 2022). Temuan penelitian ini konsisten dengan konsep tersebut, namun berbeda karena menampilkan fenomena kontradiktif di mana Kota Pekanbaru memiliki kapasitas fiskal tinggi tetapi sejumlah indikator penting seperti rasio kas, rasio aset lancar, dan rasio fleksibilitas tingkat layanan masih menunjukkan tren negatif. Hal ini memperlihatkan bahwa analisis berdasarkan tren indikator SPTK memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pengukuran kinerja keuangan parsial yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pemanfaatan metode SPTK untuk menilai kondisi keuangan daerah secara holistik melalui tiga dimensi utama: basis pendapatan, struktur utang, dan fleksibilitas tingkat layanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengukuran tren indikator keuangan sebagai alat evaluasi yang lebih prospektif dibandingkan pengukuran satu periode anggaran. Dengan mengintegrasikan hasil temuan ke dalam kerangka teori kondisi keuangan pemerintah daerah, penelitian ini memberikan bukti empiris baru mengenai dinamika keuangan Kota Pekanbaru yang dapat menjadi rujukan bagi studi kondisi keuangan daerah lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa indikator menunjukkan kapasitas fiskal yang baik, perhatian tetap diperlukan pada dimensi fleksibilitas fiskal dan likuiditas jangka pendek. Hal ini memberikan perspektif baru bahwa kapasitas fiskal tinggi tidak selalu menjamin kesehatan keuangan secara menyeluruh. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai

analisis kondisi keuangan daerah dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis tren untuk memahami kesehatan fiskal secara lebih lengkap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2017–2024 berdasarkan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) cenderung berada dalam kategori kurang baik. Pada dimensi basis pendapatan, kondisi keuangan menunjukkan hasil yang relatif baik, yang ditandai dengan empat dari lima indikator memiliki tren baik, yaitu pendapatan per belanja pegawai, rasio kemandirian, rasio antar pemerintah, dan rasio PAD per belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan pendapatan dan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada dimensi struktur utang, mayoritas indikator menunjukkan tren tidak baik, yaitu lima dari tujuh indikator yang dianalisis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam aspek likuiditas, pengelolaan kewajiban, dan keseimbangan keuangan masih memerlukan perhatian. Selanjutnya, pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan, dua dari tiga indikator menunjukkan tren tidak baik, yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat pelayanan publik dan fleksibilitas fiskal belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, dari lima belas indikator yang dianalisis, tujuh indikator menunjukkan tren baik dan delapan indikator menunjukkan tren tidak baik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kapasitas pendapatan yang relatif baik, kondisi keuangan daerah secara keseluruhan masih menghadapi tantangan terutama pada aspek struktur utang dan fleksibilitas tingkat layanan. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan Metode Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) telah tercapai.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Dari aspek waktu, penelitian hanya menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru periode 2017–2024 sehingga belum dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah dalam rentang waktu yang lebih panjang. Dari aspek lokasi, penelitian hanya berfokus pada Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik fiskal berbeda. Dari aspek data, penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah sehingga analisis kondisi keuangan sangat bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data yang terdapat dalam dokumen tersebut. Selain itu, dari aspek informan, penelitian hanya melibatkan informan yang berasal dari lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sehingga perspektif yang diperoleh masih terbatas pada pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga mampu menggambarkan dinamika kondisi keuangan daerah secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat dilakukan pada beberapa pemerintah daerah secara simultan sehingga memungkinkan adanya analisis komparatif mengenai kondisi keuangan antar daerah dengan karakteristik fiskal yang berbeda. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan penggunaan metode analisis kondisi keuangan dengan mengombinasikan Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) dengan model pengukuran keuangan daerah lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan sumber data yang lebih beragam serta pelibatan informan dari berbagai perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kondisi keuangan pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan akademik selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, atas bantuan dan dukungan dalam penyediaan data serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, arahan, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I. (2022). Kebijakan dana bagi hasil (DBH) berdasarkan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 9*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2787

Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Santis, S. (2024). Financial sustainability and sustainable development in local governments: Empirical insights. *Public Money & Management*. https://www.researchgate.net/publication/379884082

Caldas, P., Dollery, B., & Marques, R. C. (2022). Measuring what matters in local government: A municipality sustainability index. *Policy Studies, 43*(4), 738–758. https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1726311

Cifuentes-Faura, J., Fülöp, M. T., & Topor, D. I. (2024). Financial autonomy in Spanish local governments: Empirical evidence of beta and sigma convergence. *International Review of Administrative Sciences, 90*(3), 599–614. https://doi.org/10.1177/00208523231209655

Darmawati, Mediawati, E., & Rasyid, S. (2024). New trends and directions in local government finance research: A bibliometric analysis. *Public and Municipal Finance, 13*(1), 137–149. https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.11

Fahira, A., Avianti, I., & Qadri, R. A. (2025). Determinants of local government financial sustainability: The mediating role of reserve funds. *Quantitative Economics and Management Studies, 6*(5), 758–767. https://qemsjournal.org/index.php/qems/article/view/4079

Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 10*(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3732

Ginting, M. C., Simanjuntak, A., Situmorang, D. R., Panjaitan, R. Y., & Simanjuntak, R. (2024). The effect of regional original revenue and remaining budget financing on local government financial performance of provincial local governments North Sumatra for the period 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Accusi, 6*(2), 209–219. https://doi.org/10.36985/zf0wsz66

Kanoli, A. D. S., et al. (2023). Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. *Jurnal Kolaboratif Sains*. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3993

Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Financial independence, efficiency ratios, budget solvency ratios, and growth ratios in relation to financial distress of local governments. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal,* *6*(3), 1952–1973. https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/5868

Laksmiwati, N. K. S., & Yudianto, I. (2023). Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). *JURA: Jurnal Riset Akuntansi, 1*(4), 268–287. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.897

Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah,* *9*(6). https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364

Park, Y., Kim, Y., & Chen, G. (2020). Financial capacity and organizational stability in U.S. local governments. *Public Management Review,* *24*(3), 418–441. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1834606

Priyono, N., Fatimah, A. N., & Bharata, R. W. (2021). Analisis penilaian kondisi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Magelang periode tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22*(1), 244–252. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2347

Rachmadina, I. A., & Robinson. (2025). Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah wilayah Sumbagsel menggunakan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). *Journal of Accounting and Financial Management (JAFM),* *6*(2), 507–518. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2

Rahayu, S., Yudi, Y., Rahayu, R., & Ridwan, M. (2023). Local government performance: Financial condition perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* *21*(1). https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/11779

Ritonga, I. T., & Buanaputra, V. G. (2022). Developing rules of thumb for the financial conditions of city livability: A study of municipal governments in Indonesia. *Cogent Business & Management,* *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101327

Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik,* *9*(2), 96–111. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2822

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi keuangan daerah*. Ghalia Indonesia.

Sinurat, M., Simanjuntak, T. H., & Pratama, C. A. (2023). Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik,* *10*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3417

Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 9*(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2806

Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik,* *11*(1). https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381

Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of local government financial performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 12*(5), 332–347. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148

